

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, terdapat urusan pilihan yaitu kewenangan masing-masing daerah yang ditentukan berdasarkan potensi unggulan daerah yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan yang bermanfaat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, salah satunya adalah mengenai kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan adalah lembaga yang mengatur bagaimana kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, khususnya usaha perikanan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pelaku usaha perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan dalam usaha perikanan dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lain dengan kaitannya dalam penerapan-penerapan peraturan hukum di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan wawancara untuk melengkapi data sekunder

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan mempunyai peranan penting dalam peningkatan usaha perikanan di Kabupaten Pekalongan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan melakukan upaya peningkatan usaha perikanan meliputi usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan perikanan. Peningkatan yang dilakukan berupa pengembangan fasilitas penunjang usaha perikanan seperti TPI dan BBI, diadakannya penyuluhan bagi para pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan hasil usaha perikanan. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan dalam usaha perikanan yaitu, masih banyaknya nelayan dengan kapasitas kapal yang kecil dan penerapan pelarangan alat tangkap cantrang yang masih dilematis. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan adalah pembinaan nelayan dan pembidaya perikanan air tawar untuk meningkatkan hasil produksinya dan pelestarian sumber daya ikan di laut Kabupaten Pekalongan melalui pemasangan *fish apartment*/rumah ikan.

Kata Kunci : *Dinas Kelautan dan Perikanan, Tugas dan Wewenang, Usaha Perikanan, Kabupaten Pekalongan.*